

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Agency Theory* (Teori Keagenan)

1. Pengertian Agency theory

Agency Theory merupakan salah satu teori fundamental dalam studi organisasi dan ekonomi yang menganalisis hubungan kontrak oleh dua pihak atau lebih, dimana prinsipal mendelegasikan tugas atau wewenang kepada pihak lain (agen) untuk bertindak atas nama prinsipal tersebut. Teori ini pertama kali dikembangkan secara signifikan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976, yang mendefinisikan hubungan keagenan sebagai kontrak di mana seseorang (prinsipal) memberikan kepercayaan kepada orang lain (agen) untuk melakukan suatu tugas atas namanya, yang kemudian mendelegasikan sebagian kewenangan pengambilan keputusan kepala agen tersebut Jensen and Meckling (1976).¹⁶

istilah *agent* diartikan sebagai : “*a fiduciary relationship by which a party confides to another the management or some business to be transacted in the former’s name, and by which such other assumes to do the business and render an account of it*”(Suatu hubungan fidusia di mana suatu pihak

¹⁶ Michael C. Jensen and William H. Meckling, “Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure,” *SSRN Electronic Journal* 3, no. June 1974 (2005), <https://doi.org/10.2139/ssrn.94043>.

mempercayakan kepada pihak lain pengelolaan atau beberapa bisnis yang akan dilakukan atas nama pihak pertama, dan di mana pihak lain tersebut bertanggung jawab untuk menjalankan bisnis tersebut dan memberikan pertanggungjawaban atasnya). Hal demikian berarti bahwa dalam organisasi terdapat elemen yang mendukung akan apa yang sudah menjadi target atau tujuan bisnis yang diinginkan pada organisasi tersebut, yaitu dengan adanya dua orang atau lebih yang melakukan sesuatu secara bersama-sama memiliki dan mempunyai tujuan atau target yang sama.¹⁷

Pihak pengelola yang dikenal dengan nama agen dan pihak pemilik (prinsipal).¹⁸ Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa agency ialah hubungan antara dua belah pihak yang di mana pihak agen (pengelola) diberikan tugas dan tanggung jawab oleh pihak prinsipal (pemilik) untuk mengelola suatu organisasi. Reward dan punishment merupakan dua pendekatan utama dalam manajemen perilaku karyawan. Reward dapat menumbuhkan motivasi, loyalitas, dan semangat kerja. Sebaliknya, punishment berperan dalam membentuk batasan dan mengendalikan tindakan negatif. Kedua

¹⁷Fitria Rizka, "Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki Pada Lembaga Amil Zakat Dan Shodaqoh Nahdatul Ulama Provinsi Lampung."

¹⁸ IBM Wiyasha, *Manajemen Keuangan Dan Investasi Lanjutan Untuk Hotel Dan Restoran*, (2025), 99-100.

pendekatan ini saling melengkapi dan bila diterapkan secara tepat akan menciptakan lingkungan kerja yang lebih disiplin.¹⁹

Pihak prinsipal selaku pemilik tentu memiliki kewajiban dalam hal menyediakan atau memberikan apa yang menjadi kebutuhan oleh pihak agen. Pihak agen sebagai pengelola tentu juga memiliki kewajiban dalam hal ini berkewajiban untuk mengelola sumberdaya yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Namun, tidak hanya itu, agen juga memiliki kewajiban dimana kewajiban yang dimaksudkan ialah wajib untuk mempertanggung jawabkan apa yang telah dikerjakan, disini yang dimaksudkan ialah memberikan atau menyampaikan pelaporan kepada principal.²⁰

B. Transparansi Pengelolaan Keuangan

1. Pengertian Transparansi

Menurut Anggia Putri Nabillah, dkk. (2022) Transparansi merupakan suatu hal yang dilakukan dengan memberikan keleluasaan bagi siapa saja untuk melihat dan memahami apa yang sedang di selenggarakan oleh pemerintah. Dari pengertian tersebut, maka dapat di katakan bahwa transparansi merupakan suatu hal atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang (*agent*) secara terbuka dan jujur, dimana harus

¹⁹ Neraca Akuntansi Manajemen, "ISSN : 3025-9495 Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi" 25, no. 2 (2026), 3-4

²⁰ Rahmawati, "Teori Akuntansi Keuangan", 151

dilakukan dengan memberikan informasi secara terbuka terhadap orang lain (*principal*) yang memiliki wewenang untuk mengetahui atau mendapatkan akses informasi dengan luas.²¹

Melalui Transparansi, publik memiliki hak juga kebebasan akses terhadap informasi mengenai operasional dan tanggung jawab yang di jalankan oleh agen yang dalam hal ini berbicara soal keuangan dalam organisasi nirlaba, jadi prinsipal memiliki hak wewenang untuk mengetahui kondisi keuangan yang di kelolah oleh seorang agent, dimana agent ini telah di berikan suatu mandat kepercayaan oleh *principal* untuk mengelolah keuangan dalam organisasi tersebut, dengan demikian pula *agent* tersebut wajib memberikan atau menyampaikann pelaporan keuangan tersebut secara terbuka dan jujur terhadap principal yang berhak untuk mendapatkan akses terkait dengan informasi keuangan tersebut. Menurut Mardiasmo dalam Kristianten (2016), menyebut bahwa pemerintah dikatatakan transparan apabila mereka bersedia membuka diri dan menyediakan informasi yang relevan bagi masyarakat terkait seluruh kegiatan pengelolaan aset serta anggaran publik.²²

²¹ Yurika Aulia et al., "Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Deli Serdang," *Journal of Student Research* 2, no. 2 (2024): 79–86, <https://doi.org/10.55606/jsr.v2i2.2809>.

²² Angelina Trimurti Rambu Ana and Linda Lomi Ga, "ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PELAPORAN KEUANGAN BUMDES (STUDI KASUS BUMDes INA HUK)," *Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas* 9, no. 1 (2021): 62–72, <https://doi.org/10.35508/jak.v9i1.3991>.

Terdapat beberapa indikator-indikator transparansi sebagai berikut:

a. Pengurangan asimetri informasi

Indikator ini menjelaskan sejauh mana kesenjangan informasi antara agen dan prinsipal dapat diminimalkan.

- 1) Agen harus menyediakan data mengenai aktivitas organisasi agar prinsipal dapat melakukan pengawasan secara mandiri.
- 2) Dengan adanya aksesibilitas informasi akan memberikan kemudahan bagi prinsipal untuk mendapatkan informasi.

b. Laporan keuangan

Indikator ini memiliki fungsi sebagai media bagi agen untuk membuktikan bahwa mereka bertindak demi kepentingan prinsipal.

- 1) Informasi keuangan harus jujur, mencerminkan realitas ekonomi, dan tidak dimanipulasi.
- 2) Adanya verifikasi dari pihak ketiga untuk memastikan laporan tersebut bebas dari kesalahan atau kecurangan oleh agen.

a. Kejelasan target kinerja

Transparansi memastikan bahwa aturan atau perjanjian dalam hubungan keagenan dipahami oleh kedua belah pihak.

- 1) Penetapan target yang jelas dan terbuka sehingga prinsipal dapat mengukur keberhasilan agen secara objektif.

- 2) Penjelasan mengenai kompensasi yang diterima agen untuk memastikan tidak ada pengambilan keuntungan pribadi yang tersembunyi.

c. Mekanisme pengawasan

Transparansi memungkinkan prinsipal untuk terlibat dalam fungsi kontrol.

- 1) Tersedianya wadah bagi prinsipal untuk mempertanyakan kebijakan agen.
- 2) Dokumentasi atau hasil rapat yang dapat diakses prinsipal untuk mengetahui dasar pertimbangan agen dalam mengambil keputusan.

Transparansi merujuk pada penyediaan informasi yang jelas dan jujur terkait keuangan dan kebijakan yang diambil oleh suatu organisasi, serta memastikan setiap individu maupun masyarakat memiliki akses untuk memperoleh informasi tersebut.²³ Dalam pengelolaan keuangan Gereja, transparansi berarti memberikan informasi yang jelas kepada jemaat mengenai cara pengelolaan keuangan Gereja, memberikan kesempatan kepada pihak terkait (*principal*) untuk bertanya, dan memastikan bahwa laporan keuangan disampaikan dengan transparansi oleh pengelola keuangan Gereja.

²³ Anies Iqbal Mustofa, "Pengaruh Penyajian Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pematang, " *Accounting Analysis Journal* 1, no. 1 (2012): 1–6, <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj>.

Transparansi sangat penting untuk membangun kepercayaan, karena dengan akses informasi yang terbuka, jemaat akan merasa lebih yakin.²⁴

2. Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan merupakan suatu hal yang pada umumnya dipahami dengan istilah yang merujuk pada upaya menata dan mengendalikan aspek finansial di lingkup organisasi. Di dalam aktivitas finansial, terdapat tugas pokok yang harus di lakukan atau dilaksanakan oleh setiap organisasi karena tugas-tugas tersebut wajib untuk di jalankan, adapun yang dimaksudkan ialah cara untuk mengelolah sumber-sumber dana dan memanfaatkannya dengan sangat efektif. Di dalam konteks organisasi perusahaan, pengelola keuangan biasanya dituntut untuk mampu dalam berperan dengan sangat tegas dalam menjalankan tugasnya, dikarenakan dalam proses pengambilan keputusan finansial bisa saja menjadi tidak efektif dan bisa beresiko besar dalam merugikan organisasi apabila ketegasan tidak mampu di lakukan oleh pengelola keuangan.²⁵

Setiap individu maupun organisasi tentu memerlukan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan untuk mencapai target atau tujuan strategis mereka. Implementasi pengelolaan keuangan ini mencakup hal yang luas, mulai dari lingkup rumah tangga hingga

²⁴ Jemaat Pada et al., "1 , 2 , 3" 1, no. 3 (2025): 1–26.

²⁵ Hasan Samsurijal, et al., *Manajemen Keuangan*, (2022), 11-13

organisasi. Pengelolaan keuangan juga memiliki sebuah peran sebagai fondasi dalam menjaga dan mengembangkan perusahaan atau organisasi dalam jangka yang panjang. Pengelolaan keuangan pun memiliki suatu fungsi sebagai pilar yang untuk menopang berbagai bidang lain yang ada dalam suatu perusahaan atau organisasi, yang dimana dalam mencapai target atau sasaran pada setiap bidang tentu tidak terlepas dari namanya finansial, anggaran tersebut untuk membiayai dalam merealisasikan program pada setiap bidang di organisasi.²⁶

Dalam pengelolaan keuangan, transparansi merujuk pada keterbukaan dan kemudahan akses terhadap bagaimana pengumpulan, pengelolaan dan pembelanjaan sumber daya finansial yang ada pada suatu organisasi. Ini bukan sekadar mempublikasikan laporan keuangan, melainkan mencakup seluruh proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keuangan, mulai dari perencanaan anggaran, realisasi, hingga evaluasi. Transparansi dilakukan agar pihak-pihak memiliki pemahaman dengan jelas dan akurat mengenai kondisi finansial organisasi, serta bagaimana keputusan-keputusan keuangan dibuat, Trisnawati (2019). Adapun beberapa aspek penting dalam ruang lingkup transparansi pengelolaan keuangan meliputi:

²⁶ Hasan Samsurijal, et al., *Manajemen Keuangan*, (2022), 5-7

- a. Keterbukaan informasi anggaran, di mana rencana pengeluaran dan penerimaan harus jelas dan dapat diakses oleh publik. Ini termasuk rincian alokasi dan untuk berbagai program dan kegiatan.
- b. Keterbukaan laporan realisasi anggaran, yang menunjukkan bagaimana dana aktual digunakan dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Laporan ini harus disajikan secara berkala dan mudah dipahami
- c. Keterbukaan informasi mengenai sumber-sumber pendanaan termasuk donasi, hibah, atau pendapatan lainnya. Penting untuk diketahui dari mana dana berasal dan apakah ada persyaratan khusus yang di dalamnya.²⁷
- d. Keterbukaan proses pengambilan keputusan terkait keuangan, seperti penetapan kebijakan penggunaan dana atau persetujuan pengeluaran besar.

Pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan tidak dapat dilebih-lebihkan, terutama bagi organisasi yang mengandalkan dukungan publik, seperti lembaga keagamaan. Transparansi membangun fondasi kepercayaan, mencegah potensi penyalahgunaan dana, dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi penggunaan sumber daya. Dalam konteks gereja, transparansi keuangan memungkinkan

²⁷ Fenny Trisnawati, "Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Anggaran," *Jurnal Akuntabilitas I*, no. akuntabilitas dan transparansi (2014): 1–11.

jemaat untuk memverifikasi bahwa kontribusi mereka digunakan untuk tujuan yang sah dan mulia, sehingga memperkuat komitmen dan partisipasi mereka dalam pelayanan gereja.²⁸

3. Laporan Keuangan

Laporan keuangan ialah catatan tertulis yang menyajikan potret kondisi ekonomi sebuah entitas, baik untuk periode spesifik maupun situasi finansial saat ini.

Prinsip yang harus dijalankan pada pengelolaan dana dalam suatu organisasi ialah seperti berikut:

- a. Transparansi, artinya seluruh personil dalam suatu organisasi atau kelompok memiliki hak untuk mengetahui kondisi dana serta pemanfaatannya di suatu organisasi.
- b. Efisien, artinya setiap alokasi anggaran di suatu organisasi atau perusahaan harus di atur dengan sebaik-baiknya dan disesuaikan dengan keperluan utama suatu kegiatan atau program yang dilakukan agar bisa terlaksana dengan baik.
- c. Efektif, artinya bahwa pengalokasian dana wajib selaras dengan visi dan keperluan organisasi, di mana realisasi anggarannya harus berpedoman pada rencana program yang telah ditetapkan.

²⁸ Vheny Manguma, Fransiskus Randa, and Carolus Askikarno Palalangan, "Mengungkap Praktik Akuntabilitas Dalam Organisasi Gereja Toraja Jemaat Tallunglipu," *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis* 4, no. 2 (2020): 165, <https://doi.org/10.38043/jiab.v4i2.2328>.

- d. Akuntabilitas, artinya ada kewajiban bagi organisasi untuk mempertanggungjawabkan setiap penggunaan anggaran yang dilakukan.
- e. Partisipatif, artinya bahwa terdapat peran dalam melakukan perbaikan maupun koreksi, kritikan atau komentar yang dalam hal ini disampaikan yang dapat membangun akan pengelolaan dana organisasi yang dilakukan guna untuk kepentingan bersama.²⁹

C. Tingkat Kepercayaan Jemaat

1. Pengertian Kepercayaan

Kepercayaan di definisikan sebagai kesediaan untuk bergantung kepada pihak lain yang telah dipercaya (Moorman et al. (1993)).³⁰ Kepercayaan mengandung dua aspek yang berbeda yaitu kredibilitas yang merujuk kepada keyakinan bahwa pihak lain mempunyai keahlian dalam menjalankan tugasnya dan *benovelence* yang merujuk kepada kesungguhan pihak lain bahwa dia mempunyai kesungguhan untuk melaksanakan yang sudah disepakati (Ganesan, 1994).³¹

²⁹ Yeremia Kurniawan Andreanto, "Pengelolaan Keuangan Gereja Perhimpunan Injil Baptis Indonesia Persahabatan Surakarta", *Skripsi*, (2021), 12-13

³⁰ Christine Moorman, et al. "Affecting Trust In Market Research Relationship," *Journal of Marketing* 57, no. 1 (1993): 81-101

³¹ Shankar Ganesan, "Determinants of Long-Term Orientation in Buyer-Seller Relationships," *Journal of Marketing* 58, no. 2 (1994): 1-19.

Kemampuan adalah sekumpulan keterampilan, kompetensi, dan karakteristik yang memungkinkan seseorang memiliki pengaruh dalam suatu domain tertentu. Domain kemampuan bersifat spesifik, karena seseorang bisa sangat kompeten dalam bidang teknis tertentu sehingga dipercaya dalam tugas-tugas terkait bidang tersebut. Walaupun seseorang dapat dipercaya untuk melakukan tugas analitis sesuai bidang teknisnya, belum tentu ia dipercaya untuk menjalin kontak dengan pelanggan penting. Dengan demikian, kepercayaan bersifat spesifik terhadap domain tertentu (Zand, 1972). Hubungan antara integritas dan kepercayaan melibatkan persepsi bahwa pihak yang dipercaya mematuhi seperangkat prinsip yang dapat diterima oleh pihak yang mempercayai. McFall (1987) menekankan bahwa kepatuhan terhadap prinsip saja tidak cukup—prinsip tersebut juga harus dianggap dapat diterima. Jika prinsip seseorang tidak dapat diterima, maka ia tidak dianggap memiliki integritas dalam konteks kepercayaan. Hal ini mencegah anggapan bahwa seseorang yang hanya mengejar keuntungan dengan segala cara dianggap memiliki integritas tinggi (kecuali prinsip itu diterima oleh pihak lain).³² Dalam evaluasi

³² dan Schoorman et al, Mayer, Davis, "An Integrative Model of Organizational Trust Author (s): Roger C . Mayer , James H . Davis and F . David Schoorman Published by : Academy of Management Stable URL : [Http://Www.Jstor.Com/Stable/258792](http://www.jstor.com/stable/258792) REFERENCES Linked References Are Available on JSTOR F," *Academy of Management Review* 20, no. 3 (1995): 709–34.

kepercayaan, yang penting adalah tingkat integritas yang dirasakan, bukan alasan di balik persepsi tersebut.

Dalam konteks Gereja, kepercayaan jemaat merujuk pada keyakinan bahwa pengurus atau pengelola gereja bertindak dengan integritas, jujur, kompeten, dan selalu mengutamakan kepentingan jemaat serta visi pelayanan gereja. Namun, kepercayaan ini tidak dibangun dalam semalam, melainkan melalui serangkaian pengalaman positif dan konsisten dalam interaksi antara jemaat dengan institusi gereja dan juga pada para pengurusnya, Putrika and Putri (2021).³³ Dalam konteks Gereja Kristen, keuangan bukan hanya soal angka, tetapi juga mencerminkan integritas, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan, tanpa kepercayaan ini, Jemaat cenderung ragu dalam memberikan persembahan, persepuluhan, atau dukungan finansial lainnya, yang pada akhirnya dapat menghambat pelayanan di dalam lingkup Gereja. Rasul Paulus memberikan contoh konkret tentang pentingnya menjaga administrasi keuangan agar tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain dalam 2 Korintus 8:20-12 *“Sebab kami hendak menghindarkan tafsiran yang buruk tentang pelayanan kasih ini, yang kami urus. Karena kami memikirkan apa yang baik, bukan hanya di hadapan Tuhan, melainkan juga di hadapan manusia”*. Ayat ini menunjukkan bahwa niat

³³ Kadek Eti Putrika and I Gusti Ayu Made Asri Dwija Putri, “Penerapan Good University Governance Terhadap Kepuasan Mahasiswa Dengan Excellent Service Sebagai Variabel Moderasi,” *E-Jurnal Akuntansi* 31, no. 11 (2021): 2693, <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i11.p02>.

baik di hadapan Tuhan saja tidak cukup dalam hal keuangan, pengelolaan juga harus terlihat bersih dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan manusia (jemaat) untuk menghindari kecurigaan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan jemaat sangat beragam, namun beberapa yang paling dominan meliputi: integritas (kejujuran dan moralitas para pengurus), kompetensi (kemampuan pelaksanaan tugas, termasuk pengelolaan keuangan), konsistensi (kesesuaian antara perkataan dan perbuatan, serta pelaksana janji), dan keterbukaan (kemampuan dalam penyediaan informasi dengan jelas dan mudah diakses). Dalam konteks pengelolaan keuangan, transparansi merupakan salah satu prasyarat utama untuk membangun dan memelihara kepercayaan jemaat. Pengelola keuangan gereja yang benar tidak akan takut pada transparansi. Keterbukaan justru membuktikan bahwa seluruh program dijalankan sesuai kehendak Allah. Surat Efesus 5:3 menegaskan *"Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nyata, sebab segala sesuatu yang mendatangkan terang adalah terang."* Ketika pengelolaan keuangan gereja terbuka dan akuntabel, jemaat akan merasa yakin bahwa persembahan

mereka dikelola dengan baik, yang pada gilirannya akan meningkatkan keyakinan mereka terhadap pengurus gereja, Trisnawati (2018).³⁴

Terdapat beberapa indikator-indikator dalam tingkat kepercayaan jemaat berikut:

a. Keterbukaan informasi

Prinsipal atau jemaat akan percaya jika mereka mengetahui kemana arah uang mereka digunakan dan bagaimana keputusan diambil.

b. Ketersediaan dokumen keuangan

Ini untuk mengukur aksesibilitas dokumen keuangan bagi jemaat. Kepercayaan bisa menurun jika pengurus tidak menyediakan dokumen, dimana dokumen akan menjadi bukti bahwa pengurus tidak memiliki sesuatu yang perlu ditutupi.

c. Penyampaian laporan keuangan

Mengukur seberapa sering laporan keuangan disampaikan kepada jemaat. Adanya laporan keuangan yang rutin, dapat diakses, dan mudah dipahami oleh prinsipal.

d. Tingkat kepercayaan jemaat terhadap pengurus

Mengukur sejauh mana jemaat percaya bahwa pengurus merupakan orang-orang yang baik, jujur, kompeten dan memiliki integritas dalam mengelola keuangan.³⁵

³⁴ Trisnawati, "Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Anggaran."

Dampak kepercayaan jemaat terhadap gereja sangatlah signifikan. Tingkat kepercayaan yang tinggi akan berpengaruh terhadap keaktifan jemaat dalam berpartisipasi dalam kegiatan gereja. Sebaliknya, rendahnya kepercayaan dapat menyebabkan menurunnya partisipasi, krisis finansial. Kredibilitas, transparansi dan akuntabilitas lembaga pengelola dana, seperti dalam studi Zakat, terbukti secara langsung menghubungkan atribut-atribut tersebut dengan kepercayaan publik dalam pengelolaan dana Napitupulu et al. (2021).³⁶ Dalam studi tentang *Good University Governance* (GUG), ditemukan bahwa GUG memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepercayaan mahasiswa, meskipun seringkali dimediasi oleh layanan prima, Widjajanti and Sugiyanto (2015).³⁷

Kepercayaan jemaat bukanlah entitas statis, melainkan dinamis dan dapat berubah seiring waktu berdasarkan persepsi mereka terhadap kinerja dan perilaku pengurus gereja.³⁸ Oleh karena itu, gereja perlu secara berkelanjutan berupaya membangun dan memperkuat kepercayaan jemaat melalui praktik-praktik pengelolaan yang baik,

³⁵ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, 1st ed. (Yogyakarta: ANDI (Anggota IKAPI), 2018).

³⁶ Rodame Monitorir Napitupulu, Rini Hayati Lubis, and Fahrina Putri Sapna, "Perilaku Berzakat Di Masa Pandemi COVID-19," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2021): 771–77, <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2370>.

³⁷ Kesi Widjajanti and Eviatiwi Kusumaningtyas Sugiyanto, "GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE UNTUK MENINGKATKAN EXCELLENT SERVICE DAN KEPERCAYAAN MAHASISWA (Studi Kasus Fakultas Ekonomi Universitas Semarang)," *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 17, no. 1 (2015): 69–81, <https://doi.org/10.26623/jdsb.v17i1.504>.

³⁸ John Tampil and Fredik Melkias Boiliu Purba, *Strategi Manajemen Gereja Di Era Kontemporer Suatu Pendekatan Empiris Untuk Meningkatkan Efektivitas Pelayanan*, ed. fredik melkias Boiliu, 2025.

termasuk transparansi keuangan yang berkelanjutan dan akuntabilitas yang terukur.